
MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Yeni Saputri

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email: yenisaputri080893@gmail.com

M. Fachri Adnan

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email: fachri.adnan@gmail.com

Zikri Alhadi

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email: ianunpzikri@yahoo.co.id

ABTRACT

The purpose of this study was explain the management of waste by the Environmental Service of Dumai City, Riau Province. This research is a qualitative research using descriptive method. The data in this study were obtained by observation, interviews, and documentation studies. The validity of the data in this study is the source triangulation technique. Based on the results of research and discussion found that management functions have not been fulfilled optimally. This is caused by the lack of budget, facilities and infrastructure such as waste equipment that is lacking and has long been so that it cannot transport so much amount of waste, the effective and efficient implementation of HR management of the Environmental Service, and the lack of socialization to the community making it difficult to carry out tasks and the participation of the community and industry players who are still low to participate in waste management activities.

Keywords : Management, waste management, environmental service

Submitted: 14 August 2018

Reviewed: 16 February 2019

Published: 31 October 2019

How to Cite: Yeni Saputri, M. Fachri Adnan dan Zikri Alhadi. 2019. *Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup*. 3(2): pp.213-221. DOI: <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2>

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke-4 terbesar di dunia, selain itu pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat.

Salah satu wilayah yang menghasilkan banyaknya sampah adalah kawasan perkotaan. Perkembangan kota yang begitu cepat, membawa dampak yang serius terhadap masalah lingkungan. Ketidakterdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air,

sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya. Kondisi ini sering terjadi di wilayah-wilayah padat penduduk di perkotaan.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (PP Nomor 81 Tahun 2012). Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan penelitiannya, Jery Nov Pratama (2016) menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah saat ini belum menyelesaikan masalah secara optimal. Konsep pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat kota Pekanbaru saat ini kebanyakan hanya dalam konteks pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang kemudian akan menimbulkan dampak bagi lingkungan dan kesehatan di sekitar TPS berada yang didukung pula dengan perilaku masyarakat yang masih mencampurkan antara sampah kering dan sampah basah. Sebagai upaya untuk menangani sampah tersebut, perlu dikembangkan metode-metode pengelolaan sampah yang lebih pro masyarakat. Bukan lagi menitikberatkan pada membuang sampah tetapi pada mengelola sampah. Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah secara terpadu dalam bentuk program 3R (*reuse, reduce dan recycle*) bertujuan sebagai jembatan untuk mewujudkan pengelolaan sampah secara terpadu karena selama ini pengelolaan sampah dilakukan secara konvensional yaitu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

Menurut Dasman Lanin dan M. Fachri Adnan (2014) kondisi obyektif layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah masih jauh dari standar minimum, bahkan layanan terbaik. Sementara layanan publik adalah hak publik yang harus dipenuhi oleh Negara. Hampir semua penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa birokrasi Indonesia memiliki penyakit disorientasi. Berdasarkan penelitiannya, menyimpulkan bahwa layanan buruk kotamadya adalah hasil disorientasi dari fungsi dasar daerah sebagai penyedia layanan publik. Sementara itu, layanan publik yang substantif adalah layanan yang mampu menghasilkan kepuasan pelanggan kinerja fungsi dasar dan tanggung jawab pemerintah.

Masalah sampah di Kota Dumai dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kota yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kebersihan kota, pasar, jalan dan lingkungan. Pemerintah daerah Kota Dumai menetapkan sistem pengelolaan sampah dengan konsep ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi *Reusable Sanitary Landfill (RSL)*,

namun sistem ini belum berjalan dikarenakan beberapa faktor yaitu minimnya anggaran; sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan belum memadai; sistem manajemen yang belum menunjang; penyuluhan dan sosialisasi yang belum berjalan dan rendahnya partisipasi masyarakat dan pelaku industri untuk mengikuti kegiatan terhadap pengelolaan sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tahun 2017, kondisi pengelolaan sampah Kota Dumai pada tahun 2015 menghasilkan 218,88 ton sampah per harinya, karena keterbatasan sarana dan biaya maka sampah di Kota Dumai yang bisa diangkut hanya 138 ton/hari dan 80,88 ton sampah yang tidak terangkut menumpuk di wilayah Kota Dumai setiap harinya, ini menunjukkan bahwa pelayanan kebersihan belum berjalan maksimal serta kurangnya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang tentang pengelolaan sampah yang diberikan kepada masyarakat juga menunjukkan bahwa pelayanan kebersihan belum berjalan maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis telah melaksanakan penelitian di Kota Dumai tentang Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Provinsi Riau. Rumusan masalah terletak pada: 1) Bagaimana manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Provinsi Riau?, 2) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Dumai Provinsi Riau?.

Tinjauan Kepustakaan

Konsep Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen menurut Hasibuan (2011) adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam mengerjakan sesuatu pimpinan dari suatu organisasi tidak hanya bekerja sendirian, akan tetapi dibantu melalui kegiatan-kegiatan orang lain atau bawahan yang merupakan perpanjangan tangan dalam menyelesaikan pekerjaan sampai berhasil mencapai tujuan yang diinginkan Maman, (2006).

b. Manajemen Publik

Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

c. Proses Manajemen

Dalam usaha atau aktivitas untuk mencapai tujuan diperlukan manajemen atau pengelolaan agar semua berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Manajemen yang baik tersebut organisasi dapat memelihara kepercayaan anggota, meningkatkan reputasi, serta mempengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya.

Adapun proses-proses manajemen dalam Hasibuan (2011) yaitu:

- 1) Perencanaan
- 2) Pengorganisasian
- 3) Pengarahan, dan
- 4) Pengawasan

d. Tujuan dan Fungsi Manajemen

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2011), tujuan manajemen mencakup empat pokok yaitu (1) tujuan, (2) skop, (3) kepastian, dan (4) arah.

Sedangkan fungsi manajemen yaitu supaya sistematika urutan pembahasan lebih teratur, analisis pembahasan lebih mudah dan lebih mendalam, dan menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer Hasibuan, (2011). Terdapat pendekatan deskriptif PAFHRIER terhadap fungsi-fungsi manajemen yang didasarkan atas penemuan Garson dan Oveman Keban, (1995) tentang apa yang dilakukan oleh manajer publik di Amerika Serikat. Isi dari masing-masing pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Analisis Kebijakan (*Policy Analysis*)

Suatu kebijakan harus mempunyai sasaran kebijakan yang pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah dan panjang. Maksud dari kebijakan ialah sebagai bagian dari kegiatan, dimana kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

2) Manajemen Sumber Daya Manusia (*Human Resource Management*)

Dalam manajemen sumber daya manusia ada tiga hal pokok yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, menyangkut bagaimana memperoleh SDM dalam jumlah dan kualitas yang tepat. *Kedua*, bagaimana meningkatkan kualitas pengembangan SDM sedemikian rupa sehingga mereka dapat bekerja sebaik mungkin dan dengan semangat yang tinggi. *Ketiga*, bagaimana memimpin dan mengendalikan mereka sesuai dengan tujuan organisasi.

3) Manajemen Keuangan (*Financial Management*)

Manajemen keuangan diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut. Tujuan dari manajemen keuangan adalah meminimalkan biaya untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan organisasi ke arah perkembangan dan organisasi yang berjalan.

4) Manajemen Informasi (*Information Management*)

Informasi-informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, penilaian pekerjaan, sistem monitoring dan pengendalian, harus ditata, disusun dan disimpan secara teratur, sehingga dapat dengan mudah diperoleh apabila dibutuhkan.

5) Hubungan Luar (*External Relations*)

Suatu organisasi publik berada dalam suatu lingkungan yang sangat mempengaruhi dinamikanya. Karena itu, suatu organisasi harus menjaga hubungan luar. Lingkungan ini pada prinsipnya berasal dari organisasi lain atau unit lain, maupun masyarakat luas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Provinsi Riau. Informan dipilih menggunakan *purposive sampling* (sengaja). Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan Manajemen Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Provinsi Riau. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti visi misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan program kegiatan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Provinsi Riau. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk mencocokkan sumber yang penulis peroleh dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Manajemen Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Provinsi Riau

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Provinsi Riau maka dapat dijelaskan pembahasan sebagai berikut :

a. Analisis Kebijakan (*Policy Analysis*)

Kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Dumai sudah tertuang di dalam rencana strategis (Renstra) pada tahun 2016-2021 dan terdapat adanya Peraturan Walikota Dumai Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang berisi aturan dan ketentuan mengenai subjek dan objek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat pengguna jasa; prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran; penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; masa retribusi; pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi; pembayaran retribusi; keberatan;

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; pembukuan dan pemeriksaan; instansi pemungut; insentif pemungutan; pembinaan dan pengawasan; penyidikan; sanksi administrasi; dan ketentuan pidana.

Adapun tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah ini ialah menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dibidang perizinan bangunan dan retribusi sampah. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pihak dinas terlihat secara umum bahwa pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan persampahan ini sedang berjalan namun masih belum optimal dikarenakan salah satunya masih minimnya armada untuk pengelolaan sampah itu sendiri.

b. Manajemen Sumber Daya Manusia (*Human Resource Management*)

Dalam hal ini manajemen sumber daya manusia ada tiga hal pokok yang harus dipertimbangkan yaitu :

1. Jumlah Pekerja

Penentuan jumlah pekerja dilakukan bertujuan agar adanya keseimbangan dengan banyaknya jenis pekerjaan yang harus dilakukan dalam satu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas kebersihan kota Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3) berjumlah sebanyak dua ratus tiga puluh empat (234) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga kerja sukarela dan tenaga kerja lapangan. Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dilihat dari segi jumlah sudah cukup memadai dalam mendukung proses pengelolaan persampahan, namun dalam menyelesaikan pekerjaan masih belum optimal sehingga diberikan penambahan jam kerja kepada para petugas kebersihan.

2. Kualitas Kerja

Dengan adanya kualitas kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam penyelesaian suatu pekerjaan serta produktivitas kerja yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi kemajuan organisasi. Pada hasil temuan dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai masih sangat kurang, hal ini terlihat dari sebagian para pekerja yang masih banyak yang belum mengerti aturan dan tata cara terhadap pekerjaan yang harus mereka lakukan padahal instruksi kerja sudah diberikan sebelum mereka memulai pekerjaan dan belum adanya bentuk pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan oleh atasan kepada para pekerja untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan tugas.

3. Pembagian Tugas

Penggunaan sumber daya manusia lebih menekankan pada pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Pembagian tugas ini bertujuan agar arah organisasi dapat berjalan sesuai seperti yang diharapkan.

Pada hasil temuan dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sudah diatur sesuai dengan kegiatan dan tugas pada setiap masing-masing bidang. Kegiatan pengelolaan persampahan secara tugas dan fungsi ditangani oleh bidang kebersihan yang unit kerjanya berada pada bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pembagian tugas untuk setiap staf dan tenaga pengelola

kebersihan ini sudah diatur mulai dari penempatan kerja, pembagian jadwal serta lokasi pekerjaan dan setiap pembagian tugas ini sudah ada pengawas masing-masing.

4. Kesejahteraan Pegawai

Kesejahteraan yang diberikan organisasi kepada karyawan bertujuan sebagai balas jasa baik materil dan non materil yang diharapkan dapat memacu meningkatkan semangat kerja dari karyawan. Pada hasil temuan dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan pegawai sudah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai berupa pemberian gaji/upah sesuai dengan kelompok kerja masing-masing serta pemberian asuransi keselamatan kerja berupa BPJS Ketenagakerjaan, namun upah yang telah diberikan juga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dari para petugas kebersihan sehingga para petugas sering mengeluh terhadap upah yang diterimanya.

c. Manajemen Keuangan (*Financial Management*)

Pembiayaan operasional yang dibutuhkan untuk kegiatan pengelolaan persampahan/kebersihan Kota Dumai setiap tahunnya mengalami peningkatan, dilihat dari pembiayaan operasi dan pemeliharannya sendiri membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak sebanding dengan dana yang diterima, dan realisasi penerimaan retribusi persampahan /kebersihan pertahun anggarannya mengalami penurunan karena penerimaannya tidak sesuai dengan target yang ada, pada tahun 2013 mengalami kenaikan karena penerimaannya melebihi dari target yang telah ditentukan.

Pada hasil temuan dapat disimpulkan bahwa sumber pendanaan untuk anggaran pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai diperoleh dari dana APBD, dana yang diterima juga belum mencukupi untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan persampahan dikarenakan biaya yang dibutuhkan cukup besar ditambah lagi biaya pemeliharaan dan perawatan operasional membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan tidak sebanding dengan penerimaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh penerimaan retribusi yang masih jauh dari target dikarenakan perilaku masyarakat yang tidak mau membayar retribusi sampah, sehingga peningkatan pelayanan persampahan pun masih sangat sulit untuk dilakukan.

d. Manajemen informasi (*Information Management*)

Pada hasil temuan dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengkomunikasikan kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan efektif. Komunikasi yang telah dilakukan hanya di beberapa kecamatan saja dikarenakan terkendala oleh dana yang belum ada untuk menyelenggarakan acara sosialisasi tersebut. Komunikasi yang dilakukan kepada pihak kecamatan disini ialah pemberian informasi mengenai hak, kewajiban dan larangan dari setiap orang terkait pengelolaan sampah.

e. Hubungan Luar (*External Relations*)

Pada hasil temuan dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam pengelolaan sampah sudah dilakukan seperti bekerjasama dengan beberapa perusahaan industri yang ada di Kota Dumai sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap limbah industri yang dihasilkan oleh perusahaannya. Masyarakat juga sudah ikut membantu dengan membentuk bank sampah, namun adanya bank sampah ini

juga tidak membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih dan dikarenakan dana untuk membantu kelanjutan kegiatan ini tidak ada, membuat bank sampah ini tidak berjalan kembali.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada dasarnya merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuangan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah, atas dasar rasa kesadaran tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pada hasil temuan dapat disimpulkan bahwa partisipasi dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih sangat kurang, partisipasi yang dilakukan hanya sebatas membayar iuran terhadap retribusi sampah setiap bulannya bagi yang sampahnya diangkut oleh petugas kebersihan dan sebagian lagi masyarakat membuang sampahnya dirumah dan membakarnya sendiri. Belum ada masyarakat yang memanfaatkan sampahnya menjadi barang yang berguna, adapun itu hanya sebagian masyarakat yang memanfaatkan untuk keperluannya sendiri, sedangkan partisipasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan industri yang ada di Kota Dumai seperti PT Wilmar yang merupakan salah satu perusahaan pegolah minyak kelapa sawit (CPO) sudah menjalankan program CSRnya dengan memberikan penyerahan satu unit bangunan pustaka serta buku bacaan untuk Sekolah Alam Bandar Bakau yang berlokasi di Dumai, Provinsi Riau.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*; Manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Provinsi Riau yang meliputi analisis kebijakan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen informasi dan hubungan luar dapat dikatakan belum maksimal. *Kedua*; Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah terlihat masih sangat kurang, partisipasi yang dilakukan masyarakatnya partisipasi dalam bentuk uang, yaitu partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut: *Pertama*; Kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Provinsi Riau untuk meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan secara maksimal. *Kedua*; masyarakat dan pelaku industri untuk meningkatkan partisipasi mereka mengikuti kegiatan pengelolaan persampahan dan lebih meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab mereka dalam mengelola kebersihan terutama sampah maupun limbah yang dihasilkan oleh perusahaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Jery Nov Pratama. 2018. Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2016). *JOM FISIP*, Vol. 5, No. 1, hlm. 2-7.
- Keban Yeremias T. 2004. *Enam Strategi Administrasi Publik: Kosep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Lanin, D., & M. Fachri Adnan. (2014). Conceptualization Of Public Service Model on City Government. *International Integration for Regional Public Management*, 52.
<https://scholar.google.co.id/citations?user=-420>
- Malayu S.P Hasibuan. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maman Ukas. 2006. *Manajemen : Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung : Agnini Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2016 S/D 2021. 2017. Kota Dumai